



DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATRA UTARA

Elimar Sinaga¹, Tuty Alawiyah Lubis², Erwin Andy Osland Situmorang³,
Anwar Sadat Harahap⁴

^{1, 2, 3, 4} Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Medan

Alamat Korespondensi: elliellimar@gmail.com

Abstract

The number of people living in poverty increased significantly due to the global pandemic of Covid-19 in the Province of North Sumatra. The Government of Indonesia launched the Social Protection Program to slow down the poverty rate. This study attempts to find the effectiveness of the Social Protection Program and determines which programs in Social Protection contribute significantly to slowing down or reducing the poverty rate in Sumatra Utara. Utilizing the ordinary least square, we find that the Social Protection Program undertaken by the government has effectively reduced the poverty rate in Sumatra Utara. The Cash Transfers Program (Program Bantuan Sosial Tunai) and the Prework Program contribute significantly to reducing poverty. This finding may provide useful information in designing Social Protection after the pandemic ends.

Abstrak

Pandemi global Covid-19 memberikan dampak terhadap kenaikan kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara. Pemerintah dengan program perlindungan sosial telah berusaha untuk menekan laju pertumbuhan kemiskinan. Studi ini bermaksud untuk mengukur apakah program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah dapat secara efektif memperlambat laju kemiskinan di Sumatra Utara. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi program perlindungan sosial mana yang memberikan efek terbesar dalam menekan pertumbuhan penduduk miskin di regional Sumatra Utara. Dengan menggunakan *ordinary least square*, ditemukan bahwa program perlindungan sosial efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin dan program perlindungan sosial yang paling berpengaruh terhadap penekanan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program Kartu Prakerja. Temuan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam desain perlindungan sosial setelah pandemi Covid-19 berlalu.

Keywords: Bantuan, Covid-19, Kemiskinan, Pandemi, Perlindungan, Sosial

JEL Classification: E240, E620, H530



PENDAHULUAN

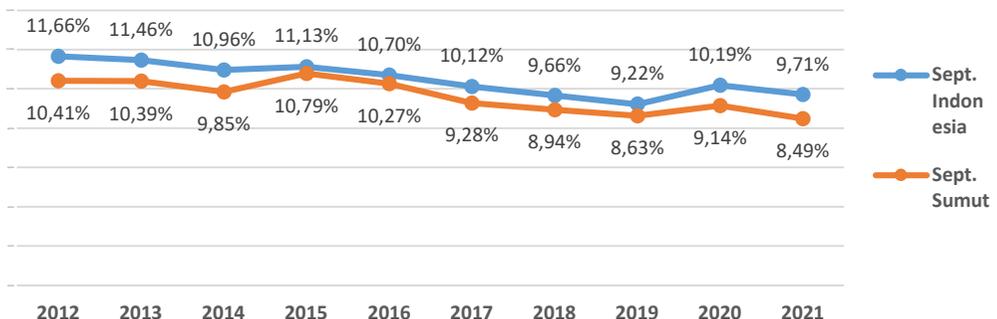
Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan-China pada Desember 2019 dan resmi diumumkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Hingga Juni 2020, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia, dengan 418 juta kasus terkonfirmasi Covid-19 dan 5,85 juta kematian per 17 Februari 2022 (John Hopkins Coronavirus Center, 2022). Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai negara guna menekan angka penyebaran kasus, mulai dari penerapan protokol kesehatan, peningkatan imunitas tubuh melalui edukasi, *testing and tracing*, larangan bepergian/*travel advice*, hingga penutupan akses masuk atau keluar/*lockdown*.

Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait percepatan penanganan infeksi virus Covid-19, di samping tetap menekankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Selain itu, guna meningkatkan pengendalian penyebaran Covid-19, diberlakukan juga

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kota dan kabupaten. Akibatnya, sejumlah aktivitas yang biasanya dilakukan dengan tatap muka beralih menjadi *virtual/komunikasi jarak jauh* dengan menggunakan sarana digital. Penerapan metode *School from Home (SFH)*, *Work from Home (WFH)* hingga maraknya penggunaan media aplikasi *zoom*, *google meet* dan sebagainya merupakan dampak penerapan kebijakan pemerintah. Sejumlah langkah yang diterapkan untuk menekan penyebaran virus ini menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat hampir pada semua sektor, baik formal maupun informal yang berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat.

Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja, hampir 85% pekerja dirumahkan akibat kantor/perusahaan tempat mereka bekerja tidak dapat beroperasi sebagai dampak penerapan PPKM (Andriyani et al., 2021). Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2012-September 2019 (sebelum pandemi

Grafik 1. Profil Kemiskinan Indonesia dan Sumatra Utara Periode September 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara (2021), diolah

Covid-19) cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015. Pada periode September 2019 tingkat kemiskinan turun di angka 9,22% dan yang kemudian naik menjadi 10,19% sebagai dampak pandemi pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sumatra Utara adalah provinsi terpadat keempat di Indonesia serta provinsi terpadat di luar Jawa, dengan kepadatan penduduk 207,40 jiwa/km² (Rahayu, 2019). Menurut BPS, jumlah penduduk Sumatra Utara mencapai 14.936.148 (Sihombing, 2022). Jumlah penduduk Sumatra Utara ini memegang proporsi 10,83% dari total proyeksi penduduk Indonesia tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan yang terjadi di Sumatra Utara tidak hanya berdampak secara regional, namun juga memberikan dampak kumulatif kepada kemiskinan Indonesia. Grafik 1 menunjukkan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara sejalan dengan penurunan/peningkatan di Indonesia.

Pasca dilanda badai pandemi, beragam badan ekonomi seperti *World Bank* memprediksi Covid-19 akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,5% di tahun 2020 (Manggala, 2020). Mendukung prediksi *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF) juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,5% di tahun 2020 (Manggala, 2020). Sementara *Fitch Solutions* mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi berkontraksi 0,8% (Sumadi, 2020). Prediksi ini tentu menjadi koreksi tajam dimana tingkat pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 5,02%.

Dari sisi dampak kemiskinan dan tingkat pengangguran, Lembaga Penelitian *Smeru* memprediksi penambahan sekitar 1,3 juta sampai 8,5 juta (+0,56% sampai 3,2%) penduduk miskin pada tahun 2020 (Suryahadi et al., 2020). Senada dengan *Smeru*, *World Bank* memprediksi skenario terburuk kemiskinan di Indonesia sebesar 11,6% apabila tidak segera ditindaklanjuti (Fadillah, 2021). Kementerian Keuangan sebagai kementerian negara yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara memprediksi penambahan 1,1 juta orang miskin baru serta 2,9 juta pengangguran baru akibat pandemi Covid-19 serta pemberlakuan PSBB (Ferlito & Rambey, 2020). Gorbiano menyatakan skenario yang lebih buruk diproyeksikan bahwa sebanyak 3,78 juta penduduk jatuh miskin hingga 5,2 juta akan kehilangan pekerjaan (dalam Ferlito & Rambey, 2020).

Melihat potensi krisis yang akan terjadi, pemerintah Indonesia merancang berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, ekonomi, keuangan, dan kesehatan sebagai prioritas utama. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp695 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Terdapat lima program penyelenggaraan PEN pada tahun 2020, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau korporasi, serta insentif usaha. Dari total alokasi PEN saat itu, alokasi terbesar dimiliki program perlindungan sosial sebanyak 31,15% diikuti dukungan UMKM atau

korporasi sebanyak 24,88%. Pada tahun berikutnya, pemerintah menaikkan pagu anggaran untuk program pemulihan ini hingga Rp744,7 triliun guna kebutuhan vaksinasi Covid-19 serta biaya perawatan pasien Covid-19 yang dipicu munculnya varian baru (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Alokasi anggaran yang luar biasa ini diharapkan dapat menolong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak jatuh begitu dalam, terutama untuk menopang ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memicu melonjaknya angka kemiskinan. Sebagaimana tujuan dari program perlindungan sosial, tulisan ini menganalisis bagaimana kluster perlindungan sosial memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi, khususnya di Sumatera Utara. Tulisan ini juga mengkaji komponen pada program perlindungan sosial yang memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk keberlangsungan penerapan program perlindungan sosial.

TINJAUAN LITERATUR

Perlindungan Sosial

Asian Development Bank (ADB) menyebutkan perlindungan sosial adalah sekelompok kebijakan guna meringankan dampak dari kemiskinan serta kemelaratan penduduk sebagai dampak dari bencana/kehilangan pendapatan yang terjadi dengan meningkatkan dan memperbaiki kapasitas (Habibullah, 2019). Sementara *International Labour Organization (ILO)* mengungkapkan bahwa perlindungan sosial memberikan ketersediaan

jaminan pendapatan dan akses ke pelayanan sosial khususnya golongan rentan, diikuti perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sepanjang siklus hidupnya (Habibullah, 2019).

Barrientos et al. (2005) secara tradisional menyatakan bahwa perlindungan sosial merupakan suatu konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan jejaring pengaman sosial. Perlindungan sosial mengacu pada kebijakan, proses, serta intervensi yang dirancang untuk mengatasi risiko ekonomi, politik, dan keamanan yang dihadapi warga negara terutama masyarakat miskin dan rentan (Suharto, 2015). Sebagian besar literatur menekankan tujuan perlindungan sosial untuk (i) melindungi pendapatan dan konsumsi masyarakat disebabkan wabah penyakit, pengangguran atau kecacatan; (ii) memerangi kemiskinan dengan memastikan akses kepada kebutuhan pokok; dan (iii) meningkatkan peluang pendapatan individu dengan memberikan akses kredit/pembiayaan serta menciptakan pasar tenaga kerja (Robalino et al., 2012).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Covid-19 adalah penyakit yang diakibatkan *Coronavirus* (Nurkholis, 2020). Orang yang terjangkit mungkin mengalami beragam gejala seperti sakit tenggorokan, demam, pilek, batuk kering, pilek, serta kesulitan pada pernafasan/dispnea. Penyakit yang disebabkan Covid-19 ini juga bisa berakibat fatal, yaitu menimbulkan pneumonia serta kerusakan organ tubuh pada penderita yang rentan. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui percikan langsung dari saluran pernafasan dan

kemungkinan penyebaran juga dapat terjadi melalui percikan tidak langsung melalui pernapasan mikro yang masih tertinggal di udara.

Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan sosial secara bersyarat oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat. Indonesia menjalankan program bantuan sosial ini mulai tahun 2007, sebagai salah satu upaya menanggulangi kemiskinan. Dalam jangka pendek, program ini diharapkan mampu menopang kebutuhan keluarga penerima. Dalam jangka panjang, bantuan sosial ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Suleman & Resnawaty, 2016). Program bantuan ini diharapkan dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosial khususnya masyarakat kelompok ibu hamil dan anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas sesuai amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Penelitian oleh Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa efektivitas Bantuan sosial (Bansos) PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menurunkan angka kemiskinan di *range* 5-7% per Rp100 triliun anggaran yang dikeluarkan (Carolina & Andini, 2021).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako

Jenis bantuan ini merupakan program bantuan sosial dari pemerintah dalam bentuk pangan atau non tunai (Rachman et al., 2018). Bantuan jenis ini diberikan setiap bulan kepada keluarga penerima guna pembelian kebutuhan makanan yang terbatas pada karbohidrat, protein nabati, protein

hewani, serta sumber vitamin dan mineral.

Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang kepada keluarga tidak mampu/miskin/rentan sebagai akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Sosial RI, 2020). Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19, pemerintah menyiapkan BST, dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjadi daya ungkit yang efektif terhadap perekonomian khususnya pada kuartal III tahun 2020.

Program Kartu Prakerja

Bantuan jenis ini merupakan bantuan berbentuk program pengembangan kompetensi seperti dukungan biaya bagi masyarakat yang mencari pekerjaan maupun masyarakat yang di PHK, dirumahkan dengan *unpaid leave*, atau yang mengalami penurunan penghasilan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2020). Target penerima manfaat adalah bagi 5,6 juta orang pekerja (Kanwil DJPb Provinsi Sumatra Utara, 2020). Beberapa persyaratan untuk memperoleh kartu prakerja seperti calon penerima mengikuti serangkaian proses/tata cara mulai dari melakukan pendaftaran *online* sampai mengikuti seleksi *batch* berdasarkan domisili.

Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu dari program pemerintah dalam bentuk uang tunai

maupun bentuk bantuan lainnya dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Negara *pioneer* yang menerapkan bantuan dalam bentuk BLT adalah Brasil. Indonesia kemudian menerapkan program ini untuk masyarakat desa terimbas Covid-19 sebagai salah satu bentuk *social safety net*. Program ini dikhususkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang berada di pedesaan. Pemerintah memandang bahwa penguatan ekonomi masyarakat terendah yang umumnya berada di pedesaan, pada akhirnya akan menguatkan perekonomian secara nasional. Artinya pemerintah fokus menyokong ekonomi masyarakat lemah untuk menciptakan perekonomian agregat yang lebih baik.

Kemiskinan

Kemiskinan bermakna tidak memiliki harta benda/kondisi serba kekurangan. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan/ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar demi kelangsungan hidup seperti kebutuhan sandang, pangan, papan/tempat tinggal, kebutuhan pendidikan, serta kesehatan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara, 2021). Untuk mengukur kemiskinan, BPS merujuk kepada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank* dimana kemiskinan merupakan ketidaksanggupan ekonomi dari sisi pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Masyarakat digolongkan 'miskin' apabila mempunyai rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditentukan.

Garis kemiskinan ditentukan oleh kebutuhan minimal untuk hidup yang perlu dipenuhi sesuai nilai rupiah yang berubah-ubah tergantung tingkat inflasi.

Penelitian Terdahulu

Rizki (2021) meneliti dampak program perlindungan sosial untuk mengatasi kemiskinan Indonesia di masa pandemi dengan menerapkan metode analisis deskriptif. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa realisasi program penanganan pandemi yaitu program perlindungan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan yang ditunjukkan melalui rendahnya peningkatan persentase penduduk miskin di masa pandemi.

Prayitno (2018) memfokuskan penelitian pada pengaruh program perlindungan sosial terhadap pendapatan rumah tangga miskin pada Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil penelitian metode *three stage least square* menyimpulkan program ini secara efektif bekerja untuk meminimalisasi tingkat kemiskinan meskipun dalam tingkat efektivitas yang rendah. Keberhasilan program ini diindikasikan oleh kinerja bantuan sosial yang berpengaruh positif terhadap kapasitas dasar sehingga mampu mengakselerasi produktivitas. Kapasitas dasar serta intervensi pasar tenaga kerja menunjukkan pengaruh positif pada kapasitas usaha. Sementara itu, jaminan sosial tidak memiliki dampak terhadap usaha peningkatan pendapatan pada rumah tangga miskin. Hal ini sesuai dengan sifat jaminan sosial yang hanya bertujuan mengawal dan memelihara rumah tangga miskin tidak menjadi semakin miskin.

Dewi & Andrianus (2021) meneliti pengaruh BLT pada kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2006-2015. Hasil penelitian yang menerapkan teknis analisis korelasi kuantitatif ini membuktikan bahwa program BLT berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Gultom et al. (2020) meneliti dampak program BPNT serta PKH terhadap usaha pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis membuktikan bahwa BPNT berdampak positif serta menunjukkan hasil signifikan terhadap usaha pengentasan bertambahnya masyarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sementara itu, PKH memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap usaha pengurangan masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Riset pada artikel ini mengangkat populasi seluruh pemerintah kota/kabupaten pada wilayah Sumatra Utara yaitu sebanyak 33 kabupaten/kota pada tahun 2021 dengan menerapkan metode kuantitatif. Data yang diambil merupakan data sekunder berupa data kemiskinan serta realisasi anggaran program PEN klaster perlindungan sosial (PKH, prakerja, sembako, BST, dan BLT) pada periode tahun 2021 pada 33 kabupaten/kota. Adapun bantuan subsidi upah tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini karena data tidak tersedia. Data tingkat kemiskinan diperoleh dari BPS Provinsi Sumatra Utara sedangkan informasi realisasi anggaran program PEN klaster perlindungan sosial bersumber dari Direktorat Jenderal

Perbendaharaan melalui aplikasi OMSPAN.

Dengan menggunakan analisis *ordinary least square*, tingkat kemiskinan akan bertindak sebagai variabel dependen sedangkan lima variabel lainnya yaitu program PEN klaster perlindungan sosial bertindak selaku variabel independen. Berikut persamaan regresi untuk melihat pengaruh program PEN klaster perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan dalam penelitian ini:

$$TK_{it} = \alpha_0 + \beta_1 PKH_{it} + \beta_2 SEM_{it} + \beta_3 PRA_{it} + \beta_4 BST_{it} + \beta_5 BLT + \mu_{it} \quad (1)$$

dimana:

TK	=	Tingkat Kemiskinan
α_0	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	=	Koefisien regresi variabel independen terhadap Tingkat Kemiskinan
PKH	=	Realisasi Program PKH
SEM	=	Realisasi Program Sembako
PRA	=	Realisasi Program Kartu Prakerja
BST	=	Realisasi Program Bantuan Sosial Tunai
BLT	=	Realisasi Bantuan Langsung Tunai
μ	=	<i>error term</i>
I	=	kab/kota
T	=	Tahun

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara deskriptif seperti pada Tabel 1, tingkat kemiskinan di Sumatra Utara rata-rata 11,09% di tahun 2021. Tingkat kemiskinan tertinggi 26,42% di Kabupaten Nias Barat dan terendah 4,01% di Kabupaten Deli Serdang. Meski

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Min	Max	Sumber
Tingkat Kemiskinan	11.09	4.78	4.01	26.42	
Sembako (juta)	29,792.70	22.26	4,581.30	90,934.20	Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi OMSPAN
PKH (juta)	72,503.24	47,077.95	14,978.20	190,881.20	
Prakerja (juta)	12,124.54	20,296.07	578.65	100,110.00	
BST (juta)	45,082.61	29,515.09	8,513.28	133,384.28	
BLT (juta)	35,765.58	31,962.83	7,819.20	122,175.00	

Sumber: Diolah Penulis

bukan pusat Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang menerima *multiplier effect* yang besar dari aktivitas ekonomi di Kota Medan. Jika dilihat dari besaran bantuan PEN khususnya klaster perlindungan sosial, bantuan PKH disalurkan paling banyak di Sumatra Utara pada tahun 2021, yaitu dengan jumlah penyaluran Rp2,39 triliun. Kemudian diikuti oleh BST sebesar Rp1,48 triliun, BLT Rp1,18 triliun, sembako Rp983,16 miliar, dan prakerja Rp400,11 miliar.

Secara rata-rata, daerah di Sumatra Utara menerima PKH sebesar Rp72,50 miliar. Penerima PKH tertinggi pada Kabupaten Tapanuli Utara Rp190,88 miliar dan terendah pada Humbang Hasundutan Rp14,97 miliar. Bantuan sembako di Sumatra Utara rata-rata disalurkan Rp29,79 miliar per daerah dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Tapanuli Utara Rp90,93 miliar dan terendah pada Nias Barat Rp4,58 miliar. Bantuan program kartu prakerja rata-rata disalurkan Rp12,12 miliar per kabupaten/kota di Sumatra Utara dengan penyaluran tertinggi pada Kota Medan Rp100,11 miliar dan terendah pada Nias Barat Rp578,65 juta.

Bantuan sosial tunai rata-rata disalurkan Rp45,08 miliar per kabupaten/kota di Sumatra Utara dengan penyaluran tertinggi pada Kota Medan Rp133,38 miliar dan terendah pada Kabupaten Pakpak Bharat Rp8,51 miliar. Kemudian BLT yang merupakan bagian dari dana desa secara rata-rata disalurkan Rp35,76 miliar dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Deli Serdang Rp122,17 miliar dan terendah pada Kota Padang Sidempuan Rp7,82 miliar.

Penggunaan metode *Ordinary least Square* (OLS) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh lima variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kelebihan OLS sebagai alat ukur adalah mampu meminimalisasi jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Salah satu syarat terpenuhinya uji model yang baik dalam OLS adalah uji asumsi klasik sebagai syarat estimasi yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*) yaitu berdistribusi normal, bebas dari heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Seluruh uji asumsi klasik sudah terpenuhi yang rinciannya dapat dilihat pada lampiran I.

Tahap pertama dilakukan uji F atau ANOVA untuk menganalisis dampak kelima variabel independen secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi parameter Tabel 2, berikut persamaan regresi atas variabel penelitian ini.

$$\text{LogTK}_{it} = 1,03 + 0,11\text{LogPKH}_{it} - 0,09\text{LogSEM}_{it} - 0,39\text{LogPRA}_{it} + 0,48\text{LogBST}_{it} - 0,09\text{LogBLT}_{it} + \mu_{it} \quad (2)$$

Dilakukan uji F atau ANOVA guna membuktikan jika terdapat pengaruh seluruh variabel independen secara simultan. Berdasarkan Tabel 2, nilai *probability F-Statistics* yaitu 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi α 10% sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu program PKH, sembako, prakerja, BST, dan BLT secara bersama-sama atau

simultan berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Sumatra Utara.

Selanjutnya, dilakukan uji t untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Berikut hasil uji t:

Pertama, program PKH memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan kepada tingkat kemiskinan di Sumatra Utara menggunakan taraf signifikansi α 10%. Sedangkan program sembako memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan kepada tingkat kemiskinan di Sumatra Utara menggunakan taraf signifikansi α 10%. Sementara itu, program kartu prakerja memiliki dampak negatif serta signifikan kepada tingkat kemiskinan di Sumatra Utara menggunakan taraf signifikansi α 10%. Kemudian, program BST memiliki dampak positif serta signifikan kepada tingkat kemiskinan di Sumatra Utara menggunakan taraf

Tabel 2. Hasil Estimasi Parameter *Ordinary Least Square*

Dependent Variable: LOG(TK)

Method: Least Squares

Date: 10/01/22 Time: 16:33

Sample: 1 33

Included observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.036064	1.646739	0.629161	0.5360
LOG(SEMBAKO)	-0.093014	0.077881	-1.194305	0.2457
LOG(PRAKERA)	-0.396897	0.052393	-7.575342	0.0000
LOG(PKH)	0.116085	0.089244	1.300762	0.2074
LOG(BST)	0.487711	0.100007	4.876788	0.0001
LOG(BLT)	-0.096500	0.056694	-1.702127	0.1035
R-squared	0.853694	Mean dependent var		2.354704
Adjusted R-squared	0.818859	S.D. dependent var		0.383971
S.E. of regression	0.163421	Akaike info criterion		-0.591849
Sum squared resid	0.560832	Schwarz criterion		-0.303885
Log likelihood	13.98996	Hannan-Quinn criter.		-0.506222
F-statistic	24.50693	Durbin-Watson stat		1.726724
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah Penulis

signifikansi α 10%. Selanjutnya, program BLT memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatra Utara menggunakan taraf signifikansi α 10%.

Besar proporsi variasi variabel tingkat kemiskinan yang mampu dijelaskan oleh semua variabel independen (program PEN klaster perlindungan sosial) adalah sebesar 85,34% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada studi jurnal. Angka ini juga menunjukkan *Ordinary Least Square* sudah sangat baik menjelaskan hubungan variabel program PKH, sembako, prakerja, BST, dan BLT terhadap tingkat kemiskinan di Sumatra Utara. Model persamaan regresi di atas diinterpretasikan sebagai berikut:

Pertama, nilai konstanta sebesar 1,036 menandakan bahwa tingkat kemiskinan Sumatra Utara diestimasi sebesar 10,36% dengan asumsi program PKH, sembako, prakerja, BST, dan BLT konstan. Sedangkan program PKH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0,12 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program PKH sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara sebesar 0,12 poin satuan. Lalu, program sembako berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0,09 artinya setiap kenaikan anggaran program sembako sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,09 satuan.

Selanjutnya, program kartu prakerja berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatra Utara, dengan besar koefisien 0,39 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program kartu prakerja sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara sebesar 0,39 poin satuan. Kemudian, program BST berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatra Utara, dengan besar koefisien 0,48 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program BST sebesar 1 satuan akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara sebesar 0,48 poin satuan. Sementara itu, program BLT berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0,09 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program BLT sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara sebesar 0,09 poin satuan. Hal ini diduga data sebaran BLT tidak merata di seluruh kabupaten/kota di Sumatra Utara dimana dari 33 kabupaten/kota, hanya 27 kabupaten/kota yang menerima BLT dana desa.

Adanya dampak program perlindungan sosial secara simultan kepada usaha menurunkan angka kemiskinan pada penelitian ini sejalan dengan hasil studi dan analisis Rizki (2021) yang meneliti hal yang sama dengan metode berbeda namun ruang lingkup yang digunakan adalah Indonesia. Hasil ini menguatkan hipotesis serta tujuan diterapkannya program ini yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial di tengah ancaman pandemi sejak tahun 2020. Begitupun adanya pengaruh penyaluran BST kepada tingkat

kemiskinan di Sumatra Utara sejalan mengikuti hasil analisis oleh Prayitno (2018) dimana memfokuskan penelitiannya di Jawa Timur dengan metode simultan metode *three stage least square*. Sedangkan pengaruh prakerja terhadap tingkat kemiskinan belum ditemukan hasil studi dan analisis yang relevan. Oleh sebab itu, hasil studi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diambil atas dasar estimasi dan analisis dampak program PEN klaster perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Sumatra Utara tahun 2021 yaitu seluruh program PEN klaster perlindungan sosial yang dalam studi ini adalah program PKH, sembako, prakerja, BST, dan BLT berpengaruh signifikan secara simultan pada tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa penyaluran program PEN khususnya klaster perlindungan sosial sudah cukup efektif dan tepat sasaran sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Sumatra Utara di tengah pandemi Covid-19.

Program PEN klaster perlindungan sosial yang berpengaruh paling besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah program kartu prakerja. Program kartu prakerja diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Prakerja digunakan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, melalui kucuran dana sebesar Rp400,1 miliar. Meski mengalami penurunan anggaran pada tahun 2021, program ini memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha mengurangi masyarakat miskin di Sumatra Utara.

Sementara itu, tingkat kemiskinan diestimasi akan mencapai 10,86% jika program PEN klaster perlindungan sosial ini tidak ada di Sumatra Utara. Artinya program ini mampu menekan tingkat kemiskinan hingga 20,53% atau sebesar 1,85 poin di tahun 2021. Namun, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penyaluran program PKH, sembako, BLT serta BST karena masih sangat diperlukan dalam mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial khususnya di masa pandemi, melalui perbaikan konsumsi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dapat mengkaji kembali mengenai besaran nilai yang diberikan, sasaran program, hingga permasalahan *database* yang belum mutakhir dan keakuratan data-data penerima.

Bagi kabupaten/kota yang tidak menerima BLT agar diberikan program bantuan lainnya. Ini karena pengaruh dan imbas pandemi Covid-19 terjadi pada seluruh kabupaten/kota.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai *input*/bahan masukan dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan program-program bantuan di Indonesia. Penelitian berikutnya disarankan dapat melakukan survei persepsi dampak penyaluran program PEN klaster perlindungan sosial yang menitikberatkan pada satu wilayah kerja atau provinsi guna memperoleh kesimpulan maupun justifikasi yang lebih menyeluruh/komprehensif. Selain itu penggunaan *time series* yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Untuk studi berikutnya juga dapat mencoba

menerapkan metode lain seperti *structural equation modelling*.

REFERENSI

- Andriyani, L., Gultom, A., Ketiar, K., Dahlan, J. K. H. A., Timur, K. C., Tangerang, K., Dahlan, J. K. H. A., Timur, K. C., & Selatan, K. T. (2021). Dampak sosial ekonomi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 2.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita resmi statistik profil kemiskinan di Indonesia September 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2021). *Profil kemiskinan Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Barrientos, A., Hulme, D., & Shepherd, A. (2005). Can social protection tackle chronic poverty? *European Journal of Development Research*, 17(1), 1–29.
- Carolina, M., & Andini, M. S. (2021). Tantangan bantuan sosial sebagai bagian extraordinary policy responses dalam pemulihan ekonomi nasional. *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN*, 03(VI), 1–23.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu*, 15(2), 77–84.
- Fadillah, A. (2021). Marko ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Analisis kemampuan pertumbuhan ekonomi dan indikator makroekonomi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia). *Ascarya Journal Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 186–203. <https://doi.org/10.53754/iscs>
- Ferlito, D. C., & Rambey, C. (2020). Kondisi ekonomi dan pasar properti Indonesia setelah pandemi covid-19. *Provalindo Nusa*, 19(June), 24–25.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. V. (2020). Analisis pengaruh program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39–53. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32812.21.1.2020>
- Habibullah, H. (2019). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1)(200), 1–14.
- John Hopkins Coronavirus Center. (2022). *John hopkins coronavirus center*. Retrieved February 17, 2022, from <https://coronavirus.jhu.edu/>
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. (2020). *Kajian efektivitas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Sumatera Utara tahun 2020*. Medan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020*. Jakarta
- Kementerian Keuangan RI. (2021).

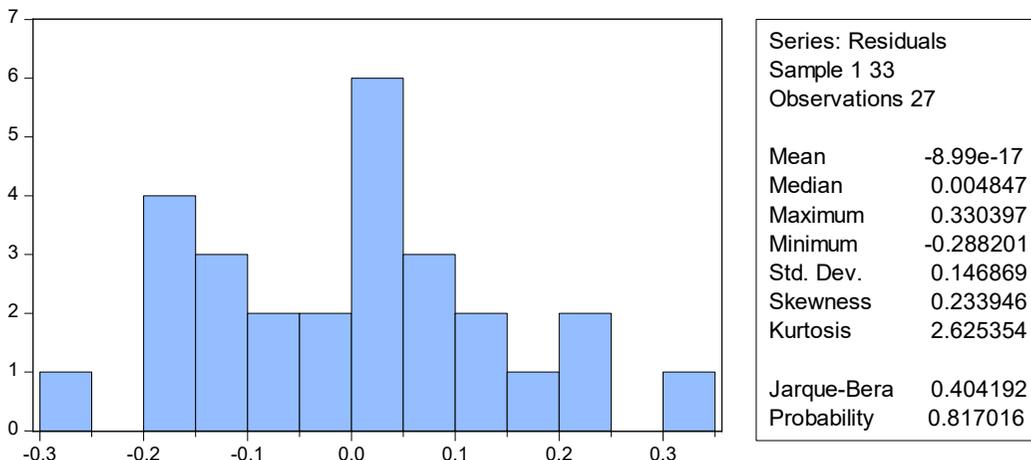
- Merekam pandemi covid-19 dan memahami kerja keras pengawal APBN* (Vol. 4, Issue 1). Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Siaran pers kemenko perekonomian RI*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2020). *Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja*. Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2020). *Keputusan menteri sosial republik indonesia nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19)*. Jakarta
- Manggala, G. D. (2020). Analisis perkembangan dan proyeksi perekonomian Indonesia dari tahun 2014-2020 setelah adanya pandemi corona. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–5.
- Nurkholis. (2020). Dampak pandemi novel-corona virus disease (covid19) terhadap psikologi dan pendidikan serta kebijakan pemerintah. *Pgsd*, 6(1), 39–49. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPS>
- Prayitno, H. S. (2018). Analisis Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur. *Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya*, 151–156.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan perspektif pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rahayu, T. E. (2019). *Pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia (Hasil sensus penduduk 2010)*. Jakarta.
- Rizki, M. (2021). Dampak program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 125–135. <https://stialan.ac.id/jurnal/index.php/gg/article/view/335>
- Robalino, D. A., Rawlings, L., & Walker, I. (2012). Building social protection and labor systems: Concepts and operational implications. *Social Protection and Labour*, 1202(1202). www.worldbank.org/sp.
- Sihombing, A. O. (2022). Analisis spasial kemiskinan di Sumatra Utara. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, 1(1). 64-77. <https://doi.org/10.4590/jarsic.v1i1.6>
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan

- sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21–27. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Suleman, S. A. & Resnawaty. R. (2016). Program keluarga harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88–92.
- Sumadi, S. (2020). Menakar dampak fenomena pandemi covid-19 terhadap perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of covid-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia (Draft). *SMERU Working Paper, April*(April), 1–20. <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>

LAMPIRAN

Lampiran I. Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas



Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera, dengan nilai Probability 0,817016 > α (5%) maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.718146	Prob. F(5,21)	0.1743
Obs*R-squared	7.838592	Prob. Chi-Square(5)	0.1654
Scaled explained SS	3.853604	Prob. Chi-Square(5)	0.5707

Uji Heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey, dengan nilai Prob.Chi-Square 0,5707 > α (5%) maka dapat dikatakan bahwa data terbebas dari Heteroskedastisitas.

3. Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 10/01/22 Time: 16:37

Sample: 1 33

Included observations: 27

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.711749	2741.570	NA
LOG(SEMBAKO)	0.006065	3503.551	3.619555
LOG(PRAKERA)	0.002745	1401.367	3.146479
LOG(PKH)	0.007964	4977.399	2.768883
LOG(BST)	0.010001	6028.090	3.195714
LOG(BLT)	0.003214	1914.045	1.675830

Uji Multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factors, table diatas menunjukkan bahwa nilai Centered VIF < 10 menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

4. Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.382604	Prob. F(2,19)	0.6872
Obs*R-squared	1.045302	Prob. Chi-Square(2)	0.5929

Uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, nilai Prob.Chi-Square 0,5929 > α (5%) menunjukkan bahwa data bebas dari gejala autokorelasi.